

KERANGKA ACUAN KERJA



Program: Pengelolaan Aplikasi Informatika

Kegiatan: Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

Sub Kegiatan: Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/ atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

TAHUN 2026

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Teknologi informasi merupakan elemen fundamental yang tidak terpisahkan dari sektor pemerintahan melalui hadirnya Pemerintah Digital (PEMDI) atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik. Namun, transformasi tata kelola menuju model yang lebih efektif dan transparan ini masih menghadapi tantangan serius, seperti belum meratanya pemahaman perangkat daerah mengenai konsep pemerintahan digital, kurangnya sinkronisasi program antar instansi, serta keterbatasan koordinasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat.

Selain itu, belum optimalnya integrasi sistem dan data antar instansi menjadi hambatan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data yang terpadu. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan fasilitasi promosi literasi untuk memastikan penerapan tata kelola e-government sesuai standar TIK, sehingga transformasi digital dapat berjalan efektif dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang telah tersosialisasi serta terliterasi dengan baik

2. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- b. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
- c. Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika.
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2029.
- e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

3. Maksud dan Tujuan

- a. **Maksud:** Mewujudkan koordinasi dan kolaborasi penyelenggaraan PEMDI/SPBE melalui penerapan tata kelola *e-government* berdasarkan pedoman dan standar pengelolaan TIK.

b. **Tujuan:**

- Mendukung digitalisasi pemerintahan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Memastikan masyarakat dan aparatur tersosialisasi serta terliterasi dengan baik mengenai layanan digital.
- Meningkatkan sinergi antar instansi pemerintah dalam penyelenggaraan SPBE.

4. Sasaran

- a. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

5. Output

Terselenggaranya kegiatan fasilitasi promosi literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE yang berupa :

- Tersusunnya Arsitektur Pemerintah Digital;
- Tersusunnya Peta Rencana Pemerintah Digital;
- Terselenggaranya kegiatan Sosialisasi Pemerintah Digital bagi OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- Terbitnya rekomendasi pengembangan aplikasi sesuai Arsitektur dan Peta Rencana Pemerintah Digital;
- Terjaganya penerapan Manajemen Layanan TI Pemprov Jateng.

6. Outcome

Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik serta terwujudnya masyarakat yang terliterasi digital dalam ekosistem SPBE.

RUANG LINGKUP

7. Lingkup Kegiatan

- a. Koordinasi kolaborasi penyelenggaraan SPBE antar instansi.
- b. Fasilitasi promosi literasi SPBE kepada aparatur.
- c. Pelaksanaan Rekomendasi Pengembangan Aplikasi Pemerintah Digital.
- d. Penyelenggaraan Manajemen Layanan TI berbasis ISO 20000-1:2018

8. Keluaran

Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi promosi literasi SPBE yang menghasilkan:

- a. Arsitektur Pemerintah Digital Provinsi Jawa Tengah.
- b. Peta Rencana Pemerintah Digital Provinsi Jawa Tengah.
- c. Berita Acara Rekomendasi Pengembangan Aplikasi.

9. Lokasi Kegiatan

Provinsi Jawa Tengah.

10. Sumber Pendanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah TA. 2026.

11. Nama Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Provinsi Jawa Tengah.

12. Kebutuhan Data

- a. **Data Utama**
 - Regulasi/Kebijakan terkait Pemerintah Digital
 - Domain Proses Bisnis
 - Domain Layanan
 - Domain Data & Informasi
 - Domain Aplikasi
 - Domain Infrastruktur
 - Domain Keamanan
 - Data perencanaan TIK
 - Dokumen rencana pengembangan aplikasi
- b. **Sumber Data**
 - RPJMD Provinsi Jawa Tengah

PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan digital yang inklusif dan terintegrasi di Jawa Tengah.

Semarang, 2 Januari 2026

**KEPALA BIDANG APLIKASI PEMERINTAH DIGITAL
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN DIGITAL PROVINSI JAWA TENGAH**



ISWAHYUDI, S.Kom., M.Kom
NIP. 19860921 200903 1 002